

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bentuk kajian bagi peneliti guna mendapatkan bahan perbandingan serta acuan dalam melakukan penelitian terbaru. Selain itu, penelitian terdahulu berfungsi untuk menghindari terjadinya kesamaan pada objek yang sedang diamati dalam penelitian ini yang merupakan hasil temuan yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya.

Adapun uraian penelitian yang dicantumkan penulis , berkaitan dengan penelitian yang akan diamati , bersumber pada berbagai jurnal terdahulu yang kemudian diringkas sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Daftar Uraian Penelitian Terdahulu

No	Penulis , Tahun, Judul, Sumber	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muzafar Shah Habbibullah Dkk (2014), <i>“Good Governance And Crime Rates In Malaysia “</i> . International Journal of Social Econimic. (IJSE:43 hal 308-310)	Analisis Tata kelolah pemerintahan terhadap tingkat kejahatan di malasia kurun waktu 1996-2009 Tingkat kejahatan property/ barang dan kekerasan	Kuantitatif ,Analisis data time-series , autoregressive model terdistribusi lag (ARDL)	Dari hasil penelitian tersebut ditemukan Negatif artinya pemerintahan yang baik dapat mengurangi tingkat kejahatan di Malaysia. Penelitian ini juga memberikan bukti bahwa praktik Good Governance dapat mengurangi kejahatan
2	Gabriela Kartika Dkk, (2013). <i>“ Studi Deskriptif Penerapan Prinsip GCG pada perusahaan keluarga di Bidang Manufaktur Kayu “</i> Jurnal Anggora Volm. 4, No. 2	Penerapan prinsip GCG pada PT Suryaraya Nusantara	Kualitatif deskriptif	Hasil Penenlitan menunjukan penerapan GCG terlaksana dengan baik sesuai dengan indikator pencapaian
3	Andrean Sianggo,DKK (2018) <i>“ Penerapan Prinsip GCG Pada Perusahaan Keluarga dalam Industri Maubel</i>	Penerapan prinsip GCG pada Perusahaan Industri Maubel	Kualitatif Uji Validitas , Trigulasi sumber	Hasil Penenlitan menunjukan penerapan GCG terlaksana belum terlaksana dengan baik pada prinsip Akuntabilitas, Responsibilitas dan Independensi

	"Jurnal Anggora Volm. 6, No. 2			
4.	Jaswadi (2016). <i>Analisa Implementasi Good Coporate Governance pada Usaha Kecil dan Menengah</i> . Jurnal Siasat Bisnis Vol. 20 No 2 2016	Analisa implementasi GCG pada sector UKM	Kualitatif deskriptif ,Kuisisioner, survey	Pengusaha Mikro dengan penjualan < 300 jt/tahun lebih melakuakan <i>Busines Survival</i> . Sedangkan Perusahaan ukuran kecil dan menengah memiliki kecenderungan dalam implementasi GCG
5	Muhammad Azhar Nasution (2021) <i>.Analisa Penerapan Good Corporate Governance pada CV Petra Kausan Medan</i> . Univesitas Sumatra Uraea.	Analisa Penerapan Prinsip GCG pada CV Petra Kausan Medan	Kualiatatif Deskriptif , Wawancara dan Observasi	Secara garis besar CV Petra Kusuma Medan Telah melakukan prinsip GCG dengan baik
6	Gabriella Judita. P (2016) , " <i>Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Coporate Governance Pada PT Aroset Jatra Karido</i> ". Jurnal Anggora Volm. 1 No. 1	Penerapan Prinsip GCG pada PT Aroset Jatra Karindo	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini menyimpulkan beberapa prinsip-prinsip Good Coporate Governance (GCG) pada PT Aroset Jatra Karido belum diterapkan dengan baik
7.	Ekky Dewi Ferlinda Dkk (2013), " <i>Implementasi Good Coporate Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan</i> (Studi pada PT. Telkom Bayuwangi)", Jurnal Adminitrasi Publik (JAP), Volm. 1 No. 4	- Penerapan Prinsip GCG pada PT. Telkom Bayuwangi - Menunjang - Peningkatan Pelayanan Service Level Guarantee (SLG) - Pengelolaan dan Pengembangan Kompetensi SDM - Tata Kelola TI	Kualitatif Deskriptif	Pelaksanaan prinsip GCG pada PT Telkom memiliki factor penghambat dan pendukung dalam penerapannya antara lain : semangat dalam melaksanakan tugas merupakan factor pendukung yang sesuai dengan UU Telekomunikasi sedangkan factor penghambat adalah kurang pemahaman tentang prinsip GCG itu sendiri
8.	Antonius Manggala Dkk, (2017). " <i>Implementasi prinsip-prinsip Good Coporate Governance pada Perusahaan di Kota Gersik</i> ". Jurnal Angoran Volm. 5 No.3	Implementasi prinsip GCG pada perusahaan di bidang karton beralokasi dikota gersik dan baru berdiri pada tahun 2014	Kualitatif Metode perhitungan Analytical Hierarchy Proses (AHA)	Dengan mengguna metode AHP penerapan GCG memperoleh nilai total sebesar 2,207. Tergolong Baik

Penelitian terdahulu digunakan penulis sebagai acuan dalam melakukan penelitian baru guna menjamin penelitian merupakan penelitian yang belum pernah diteliti dan dapat dipertanggung jawabkan . Dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis, terdapat persamaan dan perbedaaan dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaan dan perbedaan antara lain :

Tabel 2. 2 Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaaan
1.	Muzar Shah. H, Dkk “ <i>Good Governance And Crime Rates In Malaysia</i> “ Muzafar Shah Habibullah (2014)	Terdapat persamaan yaitu pembahasan tentang Tata Kelolah Perusahaan (<i>Good Governance</i>)	- Subjek penelitian merupakan beberapa perusahaan di suatu Negara Malaysia sedangkan penelitian terbaru berfokus pada satu subjek penelitian yaitu pada Persekutuan Komandite yang ada di Kabupaten Jombang - Fokus Penelitian : Penelitian ini berfokus pada pengaruh tingkat tata keolah perusahaan yang baik dengan tingkat kriminalitas di negara Malaysia, sedang penelitian terbaru fokus penelitian pada penerapan prinsip GCG pada perusahaan untuk menunjang kinerja perusahaan - Tekhnik pengumpulan data : Analisis data time-series autoregressive model terdistribusi lag (ARDL), sedangkan penelitian terbaru menggunakan teknik pengumpulan data tinggulasi sumber
2	Gabriela Kartika Purwanto dan Ronny H. “ <i>Studi Deskriptif Penerapan Prinsip GCG pada perusahaan keluarga di Bidang Manufaktur Kayu</i> “. (2013)	Fokus Penelitian : Penerapan Prinsip GCG pada perusahaan keluarga Jenis Penelitian : Kualitatif Deskriptif Teknik Pengumpulan data : Observasi , Wawancara dokumentasi, dan studi pustaka	- Tujuan penelitian: Pada penelitian ini hanya bertujuan untuk bagaimana penerapan GCG pada perusahaan keluarga , sedangkan penelitian terbaru tujuan implementasi guna meunjang kinerja keuangan perusahaan - Subjek penelitian : Pada penelitian penelitian bersubjek Perusahaan Keluarga dibidang manufaktur kayu PT Suryaraya Nusatama, sedangkan penelitian

		Teknik Analisa Data : Uji Tringgulasi , Penilaian GCG menggunakan metode skoring dan Self Assement Cheklist	terbaru subjek penelitian pada CV yang berada di Jombang
3	Andrean Sianggo,DKK (2018) “ Penerapan Prinsip GCG Pada Perusahaan Keluarga dalam Industri Maubel “Jurnal Anggora Volm. 6, No. 2	Fokus Penenlitian Pada Implemen tasi GCG Subjek pada perusahaan keluarga Teknik Analisa Data : Uji Tringgulasi Uji validitas	- Fokus penelitian pada prinsip GCG Dan kinerja keuangan perusahaan - Subjek memiliki perbedaan jenis usaha - Analisa ROA
4.	Jaswadi (2016). <i>Analisa Implementasi Good Coporate Governance pada Usaha Kecil dan Menengah</i> . Jurnal Siasat Bisnis Vol. 20 No 2 2016	Fokus Penelitian pada implementasi GCG, Objek penelitian merupakan usaha kecil dan menengah	- Pengambilan data menggunakan kuisisioner. - Hanya mengetahui tingkat pengetahuan tentang GCG - Tidak ada analisa kinerja keuangan dari bagaian penelitian
5	Muhammad Azhar Nasution (2021) . <i>Analisa Penerapan Good Corporate Governance pada CV Petra Kausan Medan</i> . Univesitas Sumatra Uraea.	Fokus Penelitian pada Implementasi GCG pada CV Menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif	- Latar objek penelitian yang berbeda. - Tidak ada pengungkapan kinerja keuangan pada penelitian.
6	“ <i>Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Coporate Governance Pada PT Aroset Jatra Karido</i> ”, Gabriella Juditha Patrice (2016)	Fokus Penelitian : Penerapan Prinsip-prinsip GCG Jenis penelitian : Kualitatif Teknik Pengumpulan data : Wawancara dan Observasi Lapangan kepada Owner dan Karyawan PT. Aroset Jatra Karido Teknik Analisa Data : Trigulasi Sumber	- Subjek dan Tempat penelitian berbeda, pada penelitian ini fokus penelitian terhadap PT Aroset Jatra Karindo. Penelitian terbaru pada persekutuan komanditer (CV) guna menunjang kinerja keuangan perusahaan
7.	Ekky Dewi Felinda, Dkk. “ <i>Implementasi Good Coporate Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan (Studi pada PT. Telkom Bayuwangi)</i> (2013)	Fokus Penelitian : Penerapan Prinsip-prinsip GCG Jenis Penelitian : Deskriptif Kualitatif	- Tujuan penelitian : Pada penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan demi kepuasan pelanggan, sedangkan penelitian terbaru tujuan implementasi guna meunjang kinerja keuangan perusahaan - Subjek penelitian :

		Teknik Pengumpulan data : Observasi Lapangan, Dokumentasi, Wawancara dan penelusuran data (Online) Teknik Analisa Data : Trigulasi Sumber	Pada penelitian penelitian bersubjek PT Telkom di Bayuwangi, sedangkan penelitian terbaru subjek penelitian pada CV yang berada di Jombang
8.	Anonius Manggala, Dkk. “ <i>Implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Kota Gersik.</i>” (2017)	Fokus Penelitian : Penerapan prinsip GCG di kota gersik dibidang kemasan karton Jenis Penelitian : Kualitatif Deskriptif Teknik Pengumpulan data : Observasi Lapangan, Dokumentasi dan wawancara dan penelusuran pendukung (online)	- Tujuan Penelitian : Penelitian ini hanya bertujuan pada penerapan prinsip GCG pada perusahaan di kota Gersik, sedangkan penelitian yang akan diteliti, akan meneliti penerapan GCG guna menunjang kinerja keuangan perusahaan - Subjek penelitian : Pada penelitian penelitian bersubjek perusahaan pada bidang kemasan karton di Gersik yang baru berdiri pada tahun 2014 serta penerimaan omzet sebesar 100-150 jt, sedangkan penelitian terbaru subjek penelitian pada CV yang bergerak dibidang percetakan dan distributor buku di Jombang - Teknik analisa data: Penelitian ini Analisis AHA yaitu Analytical Hierarchy Process sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan analisa Trigulasi Sumber

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Good Corporate Governance (GCG)

2.2.1.1 Sejarah Good Corporate Governance

Konsep Good Corporate Governance yang terus berkembang saat pada Oktober 1987 terjadi peristiwa yang dikenal sebagai New York Stock Exchange Crash dimana terdapat cukup banyak perusahaan multinasional

yang mengalami kerugian besar pada financial perusahaan. Pada saat itu, guna mengantisipasi gangguan pada bagian intren perusahaan, para eksekutif banyak melakukan rekayasa keuangan yang pada intinya adalah mengkamufase atau menyembunyikan kerugian financial perusahaan dengan membuat laporan kinerja manajemen dan laporan keuangan perusahaan membaik. Hal ini merupakan tindakan yang dapat berdampak buruk pada perusahaan. Perusahaan tidak melakukan transparansi dan menyalahi regulasi yang ada yang dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar lagi. Konsep tata kelola perusahaan ini atau Good Corporate Governance (GCG) mulai terdengar sekitar pada tahun 1990 sampai pada akhir tahun 1980 an, dimana Bank Dunia beranggapan bahwa bantuan yang diberikan pada negara berkembang, tidak akan mampu membuat negara tersebut maju. Karena pandangan pada negara berkembang dalam penataan tata kelola perusahaan masih belum efektif sehingga kebijakan dalam pengelolaan sumber daya atau kekayaan yang dimiliki perusahaan masih belum bisa dikatakan mampu membawa perusahaan tersebut menjadi perusahaan multinasional dengan sistem yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, munculnya pemahaman dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada perusahaan di seluruh dunia yang diharapkan mampu memberikan konsep tata kelola perusahaan yang sehat.

Di Indonesia, menurut Budiati (2012) Konsep Good Corporate Governance dikenal sejak terjadinya krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia sejak tahun 1997, krisis yang berkepanjangan disebabkan ketidak

mampuan dalam penataan dan pengolahan perusahaan, yang dianggap tidak bertanggung jawab serta mengabaikan berbagai regulasi yang ada yang kaya akan praktek KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Penerapan Good Corporate Governance tidak bisa terwujud disebabkan dengan adanya sistem kekuasaan politik birokrasi yang memiliki kepentingan elite dan dipengaruhi oleh para penguasa. Tuntutan adanya penerapan Good Corporate Governance muncul pada era reformasi, hal ini muncul dikarenakan adanya desakan terhadap pemerintah menuntut adanya pemerintahan yang baru yang lebih sehat, hal ini terjadi seiring dengan peralihan pemerintahan orde lama ke orde baru. Keadaan pemerintah berpindah-pindah juga dapat mempengaruhi kondisi perekonomian negara serta kebijakan yang dapat menimbulkan pengaruh dalam sistem yang ada di perusahaan.

Pada perkembangannya, penerapan GCG terus berkembang dengan adanya Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : KEP-117/M-MBU/2020 yang menetapkan bahwa penerapan good corporate governance (GCG) merupakan proses dari strukturalisasi yang harus digunakan oleh organ BUMN dalam rangka meningkatkan keberhasilan dalam usaha serta akuntabilitas pada perusahaan untuk mewujudkan nilai para pemegang saham dan memperhatikan kepentingan stakeholder yang berlandaskan pada nilai dan etika perundang-undangan.

Walaupun demikian, pada tahun 2018 ASEAN Good Governance Association (ACGA) melakukan riset CG Watch atau penilaian market melalui GC Score menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di urutan

terbawah dalam pelaksanaan tata kelolah perusahaan, dimana diantar 12 negara lainya indoensia berada jauh dibawah negara tetangga baik Malaysia maupun Australia, bahkan india yang diagap sebagai negara dengan tingkat perkembangan penduduk yang tinggi dalam tingkat tata pengolahan perusahaan masih berada diperingkat ke tujuh di atas negara Indonesia (upperline, 2019).

Hong Kong pips Singapore to 2nd; Malaysia up to 4th; Japan down to 7th with India	ACGA market CG scores		
	Market	Total (%)	Key CG reform themes and questions
	1. Australia	71	Bank governance needs overhaul, time for a federal ICAC
	2. Hong Kong	60	Going backwards on DCS, about to go forwards on audit regulation
	3. Singapore	59	Going backwards on DCS, reform direction reflects contradictory ideas
	4. Malaysia	58	Can new government rid the system of corruption and cronyism?
	5. Taiwan	56	Moving forward, yet piecemeal reforms hinder progress
	6. Thailand	55	Moving forward, yet corruption and decline in press freedom are concerns
	=7. India	54	Bank governance needs overhaul, new audit regulator disappoints
	=7. Japan	54	Heavy focus on soft law needs to be balanced with hard law reforms
	9. Korea	46	Stewardship code gaining traction, but sadly so is DCS
	10. China	41	Reinforcement of Party Committees raises numerous questions
	11. Philippines	37	CG reform low on the government's priorities, direction unclear
	12. Indonesia	34	CG reform low on the government's priorities, direction unclear
	Note: Total market scores are based on actual total scores, converted to a percentage and rounded. They are not an average of the seven category percentage scores. Total scores for each market was as follows: Australia (425); Hong Kong (364); Singapore (356); Malaysia (351); Taiwan (341); Thailand (334); India (328); Japan (325); Korea (280); China (247); Philippines (222); and Indonesia (209). Source: ACGA		

Sumber : Riset ACGA, Coporate Governance Watch atau CG Watch (2018)

Gambar 2. 1 Market Coporate Governance Scores

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Mas Ahmad Daniri Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), menurut Mas Achmad ketertinggalan negara indonesia dalam penerapan GCG ini bukan berarti negara Indonesia tidak melaksanakan penerapan GCG itu sendiri, akan tetapi semua negara sedang berloamba-lomba dalam memperbaiki sistem tata kelola perusahaan sehingga negara Indonesia belum mampu mengejar ketertinggalannya diantara negara-negara lainnya.

2.2.1.2 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan dasar yang dapat digunakan dalam memahami tata kelola perusahaan/ *corporate governance*. Hubungan agensi menggambarkan suatu kontrak satu atau lebih principal yang melibatkan orang lain (agen) untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Jasen & Meckling 1976).

Pihak principal adalah pihak yang memberikan perintah kepada pihak lain yaitu agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama principal. Pemilik perusahaan yaitu principal selalu ingin mengetahui semua informasi yang mengenai aktivitas perusahaan, termasuk dalam aktivitas manajemen dalam hal pengoprasian dana yang di investasikan dalam perusahaan.

Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang sering terjadi pada pihak-pihak yang saling berkerjasama memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda. Secara khusus teori keagenan membahas tentang adanya hubungan keagenan, dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan. Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Eisenhardt, 1989 dalam Darmawati,dkk.2006).

Pada perusahaan keluarga keagenan sendiri timbul karena beberapa hal yaitu adanya masalah yang timbul pada saat keinginan atau tujuan dari

principal dan agen berlawanan dan juga untuk melakukan verifikasi atas apa-apa yang telah dilakukan secara benar oleh agen. Dalam perusahaan keluarga terjadi kesulitan dalam melakukan verifikasi kebenaran yang telah dilakukan oleh agen secara tepat.

Kemudian dari hal tersebut akan menimbulkan resiko dimana apabila principal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko yang ada dalam perusahaan karena adanya perbedaan preferensi resiko.

2.2.1.3 Pengertian Good Corporate Governance (GCG)

Sistem Tata kelola perusahaan merupakan perhatian penting bagi para stakeholder khususnya pada perusahaan keluarga dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Terdapat sekumpulan prinsip-prinsip yang dapat mengarahkan dan mengendalikan sistem perusahaan sehingga memperoleh keseimbangan antar pemberi kebijakan serta dapat mempertanggungjawabkan kepada para stakeholder. Dengan adanya sistem ini pula tingkat kepatuhan akan perundangan-undangan dan berbagai regulasi pemerintahan akan terealisasi dengan baik serta nilai etika yang berlaku secara umum akan berjalan dengan sewajarnya tanpa ada penyelewengan.

Terdapat berbagai definisi yang terkait dengan pengertian Good Corporate Governance . Dalam beberapa definisi disesuaikan dengan kepentingan Negara dan institusi serta tradisi yang berkaitan dengan kepentingan setiap institusi akan tetapi memiliki tujuan dan manfaat yang sama dalam peningkatan kinerja perusahaan. Penerapan GCG dikenal

sebagai sistem yang mampu mengendalikan serta mengatur kebijakan pada perusahaan, konsep dari pengendalian ini lebih ditunjukan kepada para eksekutif perusahaan dengan tujuan mampu mengurangi tindakan yang dianggap dapat merugikan yang dapat mengganggu etika, moralitas dan prinsip kerja perusahaan bagi para pemangku kepentingan pada perusahaan, yang mampu mengurangi tingkat kepercayaan para stakeholder

Adapun definisi Good Corporate Governance (GCG) menurut YYPMI (2002:21) Good Corporate Governance adalah “ Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”.

The Institute For Corporate Governance mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai suatu proses dan suatu struktur yang ditetapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utamanya meningkatkan nilai para pemegang saham dalam jangka panjang, dan dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lain. (Supriyatno, 2000:17).

Dedi Kusmayandi, Dkk dalam bukunya menyatakan bahwa menurut Sutedi (2011) Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan

kepentingan stakeholder lainnya berdasarkan undang-undang dan nilai etika .(Dedi Kusmayadi, Dkk. : 2015).

Berdasarkan pernyataan diatas, Pengertian Good Corporate Governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara perusahaan dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan baik pemegang saham, karyawan, pemerintah hingga kreditur dan berbagai pihak yang lainnya dalam rangka menjaga nilai perusahaan secara jangka panjang dengan melakukan pengendalian , pengolahan dan pengarahan pada perusahaan dengan tujuan meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan yang berdasarkan pada undang-undang dan nilai-nilai etika. Dimana GCG ini akan mempengaruhi perusahaan dalam segi moralitas serta kinerja perusahaan sehingga bisa memiliki kinerja yang efektif dan efisien dan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

2.2.1.4 Prinsip Good Corporate Governance

Dalam penerapannya prinsip GCG memiliki lima prinsip yang mendasar pada sistem penerapan pada perusahaan. Prinsip tersebut meliputi Transparency, Akuntability , Independency, Responsibility dan Fairness. Yang kemudian lima prinsip ini lah yang menjadi dasar dan tolak ukur dalam penilaian perusahaan.

Hal ini telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia No. 11./33/PBI/2009 dan didukung dengan adanya Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, menerangkan bahwa *Corporate Governance* merupakan bagian dari suatu proses struktural yang

digunakan oleh organ BUMN dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan serta menciptakan nilai para pemegang saham secara jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, serta berlandaskan pada peraturan dan nilai-nilai dan etika. (Antonius Manggala.W,Dk : 2017, hal 2).

Penerapan GCG pada perusahaan sangat penting dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas perusahaan dalam jangka panjang dan berkelanjutan Terdapat lima prinsip dalam penerapannya, adapun dari prinsip tersebut antara lain :

A. Transparasi

Suatu kewajiban yang dimiliki perusahaan dalam menyampaikan informasi haruslah secara transparan terbuka, dapat diakses , jelas dan tepat waktu serta mampu dibandingkan. Transparansi memastikan adanya keterbukaan dalam penyampaian informasi secara tepat waktu dan akurat, keterbukaan ini, dapat mencakup berbagai hal tidak terbatas pada informasi pengelolaan resiko, kebijakan, dan pengelolaan keuangan. Perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan setiap kegiatan perusahaan secara transparan dan wajar. (Dedi Kusmayadi, Dkk. 2015).

Oleh karan itu, perusahaan harus mampu memberikan informasi secara transparat dan akurat kepada para pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan agar para pemangku kepentingan mampu mengetahui keadaan perusahaan.

Adapun penerapan prinsip transparasi yang dapat dilakuka dalam perusahaan adalah sebagai berikut:

- a) Pemegang kepentingan seperti halnya manajemen, karyawan, konsumen mampu melihat dan memahami proses dari pengambilan keputusan manajerial pada perusahaan, contoh dalam penentuan harga barang dan kebijakan umum
- b) Pemegang saham memiliki hak memperoleh informasi tentang keuangan perusahaan yang relevan seperti laporan keuangan, kas harian, bukti pembayaran
- c) Informasi mengenai prosedur serta kebijakan setiap unit kerja dipublikasikan secara tertulis serta dapat diakses oleh berbagai pihak.
- d) Kewajiban perusahaan dalam menyediakan informasi terkait visi, misi, sasaan perusahaan dan strategi perusahaan serta kebijakan, budaya perusahaan yang bersifat oprasional. (Dedi Kusmayadi, Dkk: 2015).

B. Akuntabilitas (Accountability)

Dalam prinsip akuntabilitas memuat tentang kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh setiap organ perusahaan, pada setiap karyawan pada unit kerja masing-masing. Yang setaiap individu memiliki tanggung jawab atas kemampuan menjalankan tugas dan wewenang yang telah diberikan. Perusahaan harus memiliki kemampuan dalam mempertanggungjawabkan setiap kinerja perusahaan dalam berbagai aktifitas selama pengeolahan perusahaan.

Oleh karenanya perusahaan haruslah dikelolah secaa baik dan benar serta terukur sesuai dengan para pemangku kepentingan baik pemerintah maupun konsumen. Akuntabilitas merupakan prasyarat bagi perusahaan guna

mencapai kinerja perusahaan yang berkesinambungan (Dedi Kusmayadi, Dkk: 2015). Dalam penerapannya prinsip akuntabilitas dalam praktik berbisnis dapat dilakukan sebagai berikut, diantaranya:

- a) Perusahaan dapat menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan seperti daftar tugas dan tanggung jawab
- b) Perusahaan dapat menjamin bahwa semua organ perusahaan termasuk karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan GCG
- c) Perusahaan memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi seperti pemberian reward dan punishment

C. Responsibility (Tanggung Jawab)

Prinsip ini memastikan perusahaan, direktur maupun para kordinator unit dapat melakukan setiap kegiatan oprasional perushaan secara bertanggung jawab. Perusahaan sebagai pengelola haruslah menghindari berbagai biaya transaksi diluar kesepakatan yang dapat berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain yang dapat menyalahi regulasi, undang-undang, kotrak maupun pedoman dalam operasional bisnis perusahaan.

Perusahaan haruslah mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan secara

berkesinambungan dalam jangka panjang dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau good corporate citizen. (Dedi Kusmayadi, Dk: 2015.).

Contoh penerapan prinsip Responsibility yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah:

- a) Organ Perusahaan harus berpegangan pada prinsip kehati-hatian dan mematuhi terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan serta anggaran dasar. Seperti pembayaran pajak, tariff upah UMK
- b) Pemimpin, karyawan dan manajer perusahaan harus mengetahui serta memahami keseluruhan dari peraturan yang berlaku pada perusahaan. seperti kejelasan SOP
- c) Karyawan dan manajer perusahaan harus berkerja sesuai dengan standar operasional, prosedur dan ketentuan yang telah disepakai yang berlaku di perusahaan.
- d) Manajer dan unit organisasi melakukan pertanggungjawaban hasil kerja secara teratur. (Dedi Kusmayadi, Dkk: 2015 hal 35-36).

D. Independency

Prinsip independency menjadikan pengelolaan perusahaan supaya dapat bertindak mandiri sesuai dengan fungsi dan perannya yang dimilikinya tanpa terlibat berbagai tekanan dari berbagai pihak yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang ada. Dalam memperlancar pelaksanaannya prinsip ini dalam perusahaan harus dikelola dengan secara independen sehingga organ perusahaan tidak ada dominasi dan intervensi dari berbagai pihak. (Dedi Kusmayadi, Dkk: 2015).

Adapun penerapan prinsip independen yang dapat lakukan perusahaan adalah sebagai berikut:

- a) Keputusan pemimpin perusahaan harus terlepas dari kepentingan pribadi maupun pihak-pihak yang dapat merugikan perusahaan seperti pihak ketiga, eksteren perusahaan
- b) Keputusan yang diambil dilakukan secara objektif demi kepentingan perusahaan
- c) Organ perusahaan harus menghindari adanya dominasi oleh pihak manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu dan terbebas dari benturan kepentingan dari pengaruh serta tekanan dari berbagai pihak.
- d) Organ perusahaan melakukan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Dan tidak adanya pelemasan tanggung jawab antar organ perusahaan. (Dedi Kusmayadi, Dkk:2015)

E. Fairness (Keadilan)

Prinsip ini dapat didefinisikan sebagai prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak para stakeholder baik karyawan, pemerintah, manajer yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan yang telah berlaku. Prinsip ini mencakup kejelasan dalam hak yang diperoleh setiap organ perusahaan, dengan adanya prinsip tersebut maka sistem hukum, peraturan, perjanjian yang berlaku akan berjalan dengan semestinya. Guna menghindari terjadinya segala bentuk fraud/ kecurangan, KKN atau tindakan yang dapat merugikan berbagai pihak. Dalam prinsip fairness haruslah dilengkapi dengan adanya peraturan

perundang-undangan yang tegak, jelas serta konsisten guna menjamin perlindungan atas hak-hak setiap organ pada perusahaan (Dedi Kusmayadi, Dkk : 2015).

Keadilan perlakuan serta pemenuhan hak pada perusahaan menjadi penting guna memelihara kesejahteraan perusahaan dan mampu menjamin masa depan perusahaan terhindar dari segala kecurangan serta penyalagunaan hak dan wewenang. Adapun penerapan adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam memberikan saran dan masukan saat menyampaikan pendapat, serta dapat mengakses informasi secara transparan sesuai dengan porsi yang di perlukan.
- b) Perusahaan melakukan perlakuan sama dan setara serta wajar kepada seluruh karyawan dan pihak yang berkepentingan sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan kepada perusahaan
- c) Direktur, pimpinan unit kerja dan karyawan mampu membedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan.
- d) Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, kesempatan berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan latarbelakang suku dan ras serta gendre dan kondisi fisik satu dengan yang lain. (Dedi Kusmayadi, Dkk : 2015).

2.2.1.5 Tujuan Good Coporate Governance

Dalam penerapan Good Coporate Governance/ tata kelolah perusahaan memiliki berbagai tujuan yang dapat dicapai dengan adanya

penerapan ini. Menurut Dr. Desi Kusmayadi (2015) dalam buku menjelaskan dengan adanya implementasi mekanisme GCG diharapkan mampu mengurangi masalah-masalah yang timbul akibat adanya masalah keagenan. Kemudian dengan adanya kesadaran akan penerapan GCG ini dapat mendorong adanya transparansi perusahaan, para investor akan memberikan apresiasi terhadap informasi yang disajikan guna dapat mengevaluasi hasil kinerja perusahaan.

Penerapan Good Corporate Governance ini mampu mencegah terjadinya kecurangan yang terjadi dalam perusahaan seperti *insider trading* atau adanya perdagangan didalam perusahaan, transaksi karna adanya hubungan istimewa yang dapat merugikan perusahaan, dengan adanya penerapan ini tata kelola perusahaan akan secara otomatis menciptakan iklim persaingan yang sehat. (Dedi Kusmayandi, Dkk :2015).

Menurut Dedi Kusmayadi, Dkk (2015) dalam bukunya menyatakan penerapan system GCG dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan melalui beberapa tujuan berikut :

- a) Meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kesinambungan suatu organisasi yang dapat memberikan kontribusi terhadap terciptanya kesejahteraan para pemegang saham, karyawan, stakeholder dan mampu memberikan solusi dalam menghadapi tantangan dimasa mendatang
- b) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki shareholder dan stakeholder.

- c) Meningkatkan legitimasi atau kualitas dalam perusahaan yang dikelola secara terbuka, adil dan mampu dipertanggungjawabkan.

Dalam penerapan tata kelola perusahaan, beberapa perusahaan menerapkan sistem keyakinan yang kuat dalam mengelola perusahaan, hal ini dapat menjadi hal yang baik bagi perusahaan apabila sistem GCG diterapkan berdasarkan keyakinan dan konsisten yang tinggi. Kepatuhan akan penerapannya dapat diikuti oleh seluruh jajaran karyawan perusahaan apabila pada tingkat tertinggi dalam perusahaan yaitu direktur/ pemimpin perusahaan, melakukan penerapan secara konsisten dan berkelanjutan.

A. Faktor-Faktor Penerapan Prinsip Good Corporate Governance

Dalam buku *Good Corporate Governance*, Dedi Kusmayadi, Dkk : 2015, syarat keberhasilan dalam penerapan GCG dipengaruhi beberapa faktor diantaranya :

a) Faktor Eksternal

- Terdapat sistem hukum yang baik.
- Dukungan dari pelaksanaan GCG dari sektor publik maupun lembaga pemerintah.
- Terdapat contoh dari tata pelaksanaan penerapan GCG yang tepat.
- Adanya dukungan penerapan GCG dalam tatanan nilai sosial pada masyarakat.
- Keinginan adanya perkembangan akan pemberantasan praktik KKN , serta perbaikan terhadap kualitas pendidikan dan pemahaman di lingkungan publik.

b) Faktor Internal

- Terdapat budaya perusahaan yang dapat mendukung penerapan GCG.
- Keterbukaan informasi.
- Terdapat sistem audit yang efektif dalam perusahaan.
- Adanya sistem pengendalian resiko perusahaan yang berdasarkan prinsip GCG.
- Kebijakan dan peraturan yang dibuat berdasarkan prinsip GCG.

2.2.2 Perusahaan Keluarga

2.2.2.1 Pengertian Perusahaan Keluarga

Suatu perusahaan keluarga dapat dikatakan sebagai perusahaan keluarga apabila terdapat minimal ada dua generasi dalam keluarga tersebut dan keberadaan keluarga tersebut mempengaruhi kebijakan perusahaan , perusahaan sebagai perusahaan keluarga apabila dikendalikan oleh keluarga tunggal khususnya dalam pengambilan kebijakan dan keputusan dalam bisnis (Susanto, 2005)

Anggota keluarga biasanya ikut serta dalam menjalankan perusahaan, anggota keluarga memiliki hak khusus seperti dalam memperkerjakan anggota/ rekan keluarga tanpa ada proses seleksi serta dalam penempatan kerja sesuai keinginan prinsipal. CV Wahana Karya Jaya termasuk perusahaan keluarga dimana dalam sistem tata kelolahnya melibatkan anggota keluarga, dimana direktur perusahaan merupakan pemilik dari perusahaan tersebut.

2.2.2.2 Tipe-Tipe Perusahaan Keluarga

Menurut Susanto (2005) terdapat beberapa tipe perusahaan keluarga yang ada, yaitu :

1. *Family Owned Enterprise (FOP)*

Perusahaan yang dimiliki oleh keluarga tetapi dikelola oleh eksekutif profesional yang berasal dari luar lingkungan keluarga. Disini pemilik merupakan keluarga tidak meliatkan diri dalam pengelolaan perusahaan dengan tujuan agar dalam pengelolannya berjalan secara profesional. Sehingga anggota keluarga hanya berperan sebagai pengawas dan pengendali. Sedangkan menurut Tjondrorahardja, 2005 FOE adalah perusahaan yang dimiliki keluarga saham dan kepemilikan akan tetapi dalam pengoprasiaannya menggunakan tenaga profesional/tenaga ahli.

2. *Family Bussines Enterprise (FBE)*

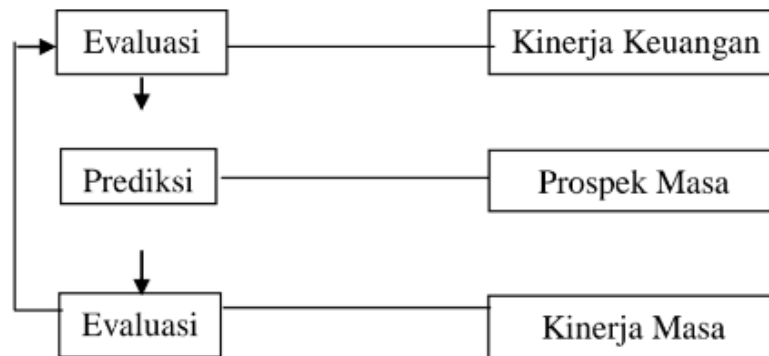
Perusahaan milik keluarga yang didirikan dan dikelola oleh keluarga sendiri. Keluarga memiliki karakteristik adalah terdapat pemegang posisi kunci dalam pengelolaan perusahaan. Di Indonesia sendiri jenis ini sangat banyak digunakan oleh pembisnis. Sedangkan menurut Tjondrorahardja, 2005 adalah perusahaan dimana saham dan bentuk kepemilikan dimiliki oleh keluarga serta dalam pengelolahannya dilakukan oleh anggota keluarga yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan bersama dalam perusahaan.

Dalam hal ini, CV Wahana Karya Jaya merupakan jenis perusahaan keluarga *Family Business Enterprise (FBE)* karena perusahaan dipimpin sendiri oleh pemilik perusahaan yaitu H. Wachid S.Ag yang didirikan pada tahun 1997. Pemilik juga berprofesi sebagai kepala sekolah sehingga dalam pengawasan perusahaan di bantu oleh anggota keluarga beliau yang merupakan anak kandung pemilik.

2.2.3 Kinerja Keuangan

Dalam menilai kinerja perusahaan, seorang investor maupun pemegang saham dapat mengamati kondisi perusahaan melalui kinerja keuangan perusahaan. Segala kegiatan oprasional yang dilakukan oleh perusahaan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap laporan kinerja keuangan. Kinerja keuangan pada umumnya berbanding lurus dengan kinerja perusahaan karena perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara maksimal. Dengan perusahaan mencapai tujuan tersebut maka dinilai memiliki kinerja perusahaan yang baik.

Menurut Francis Hutabarat (dalam buku *Analisa kinerja keuangan Perusahaan, 2020*) Kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk melihat seberapa jauh perusahaan mampu telah melaksanakan dan menggunakan kebijakan serta pelaksanaan keuangan secara baik.



Sumber : Francis Hutabarat, MBA, CIBA (2020)

Gambar 2. 2 Konsep Analisi kinerja keuangan

Penganalisaan kinerja keuangan dapat diawali dengan mengevaluasi kinerja pada tahun sebelumnya, yang kemudian dari hasil evaluasi tersebut akan memperoleh hasil dimana hasil tersebut dapat menentukan dan melihat prospek kinerja keuangan di masa depan, setelah itu mengevaluasi kondisi sekarang yang sudah terjadi dimasa lalu guna meningkatkan kinerja keuangan dimasa yang akan datang. Kinerja keuangan merupakan cerminan dari berbagai pekerjaan yang telah diselesaikan dari hasil pekerjaan tersebut kemudian dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. (Francis Hutabarat, 2020 Hal 2).

2.2.4 Analisa Kinerja Keuangan

Dalam melakukan analisis kinerja keuangan dapat dilihat pada laporan keuangan perusahaan, dalam laporan keuangan kita mampu mengetahui kelemahan atau kelebihan dalam kinerja keuangan dengan cara analisa tersebut. Dalam menilai kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan perbandingan terhadap perusahaan yang bergerak pada bidang yang sama atau

dengan membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, laporan ini akan berguna bagi para kreditur dan investor dalam pengambilan keputusan

Dengan demikian analisa laporan keuangan dapat membantu manajemen dalam memperbaiki adanya kelemahan dan kekurangan dalam perusahaan yang selanjutnya akan dibuat keputusan yang rasional dalam memperbaiki kinerja perusahaan. (Francis Hutabarat, 2020, hal 15).

A. Tahapan Penganalisisan Kinerja Keuangan

Dalam penganalisisan kinerja keuangan dapat dilakukan dengan beberapa tahap yang dilakukan pada perusahaan pada umumnya, yaitu :

- a) Melakukan review pada data laporan keuangan.

Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan kaidah akuntansi yang berlaku.

- b) Melakukan Perhitungan

Dalam perhitungan dapat melakukan beberapa metode perhitungan yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang terjadi sehingga dapat memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan/ sasaran. Dalam penelitian ini, penelitian bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan sebagai akibat dari penerapan prinsip GCG. Adapun metode perhitungan yang digunakan adalah rasio profitabilitas yaitu Return On Assets (ROA), rasio ini dapat menilai bagaimana tingkat pengolahan asset dan sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan menilai presentase laba / keuntungan yang di dapatkan perusahaan.

c) Perbandingan Hasil Perhitungan Yang Telah Diperoleh

Dari perhitungan tersebut, kemudian dibandingkan. Metode perbandingan dapat dilakukan menggunakan dua metode *Time Series Analysis* atau dengan *Cross Sectional Approach*.

- *Time Series Analysis*, adalah metode perbandingan dengan membandingkan Time Series atau waktu / antar periode sehingga dapat memperoleh hasil yang dapat dilihat melalui grafik.
- *Cross Sectional Approach*, adalah metode perbandingan dengan membandingkan hasil perhitungan dari rasio tersebut kemudian dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode perbandingan *Time Series Analysis*, dengan membandingkan perhitungan dengan periode di tahun sebelumnya. Pada kedua metode tersebut merupakan perbandingan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi perusahaan apakah dalam kondisi baik/normal atau buruk.

d) Penafsiran atau analisis terhadap kendala yang ditemukan.

e) Pencarian pemecahan masalah terhadap temuan permasalahan. (

Francis Hutabarat, 2020 hal 5-6)

B. Perhitungan Rasio Profitabilitas (ROA)

Menurut Mardiyanto (2009:196) Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba karena rasio tersebut mewakili pengembalian atas aktivitas perusahaan. Menurut Hery (2014:193)

semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset tersebut. Menurut Munawir dalam jurnal Rendi Wijaya (2019) tentang *Analisa Perkembangan ROA dan ROE dalam Mengukur Kinerja Keuangan* menyebutkan bahwa kelebihan analisis rasio ROA yaitu Sifatnya yang menyeluruh, dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan yang dilakukan oleh divisi/bagian, juga dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan dan berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk keperluan perencanaan. Adapun perhitungan dari ROA adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih setelah pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

(Eduardus Tandelilin 2010:372)

2.2.5 Tujuan Analisa Laporan Keuangan

Menurut Francis Hutabarat (2020) Tujuan dari adanya analisa laporan keuangan secara umum adalah untuk mengetahui :

1. Mengetahui posisi keuangan pada periode tertentu, bagaimana posisi keuangan pada tahun tertentu terutama tingkat laba dan pemanfaatan asset yang dimiliki oleh perusahaan.

2. Mengetahui kekurangan dan kekurangan perusahaan, dengan melakukan analisa keuangan perusahaan mampu mengetahui potensi kelemahan dan kelebihan yang dimiliki perusahaan.
3. Membantu dalam menentukan kebijakan dan perbaikan proses di masa depan.
4. Penilaian kinerja perusahaan, kinerja manajemen perusahaan.
5. Mengetahui hasil pencapaian yang telah dicapai perusahaan dengan dapat membandingkan dengan perusahaan sejenis.

Adapun tujuan dari analisis laporan keuangan lainnya adalah :

- Screening

Melihat data yang terdapat pada laporan keuangan guna kepentingan para stakeholder atau pemangku kepentingan

- Forecasting

Analisis yang bertujuan memperkirakan kondisi keuangan perusahaan dimasa mendatang

- Diagnosis

Analisis yang bertujuan melihat kemungkinan permasalahan yang akan terjadi, baik secara manajemen operasional, keuangan dan masalah lainnya

- Evaluation

Evaluasi yang digunakan untuk menilai manajemen operasional dan tingkat pengelolaan perusahaan

- Understanding

Dengan adanya analisis seluruh lapisan oragan perusahaan mampu memahami dari hasil analisa keuangan yang menghasilkan informasi yang dapat difahami dan diterima berbagai pihak.

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Nursalam (2017) Kerangka konseptual adalah konsep dari abstraksi dari realitas yang kemudian dikomunikasikan dan membentuk suatu teori, yang berisikan keterkaitan antar variable yang akan diteliti. Dari hasil penjabaran diatas kerangka pemikiran penelitian yang terbentuk adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual menggambarkan penerapan prinsip tata kelolah perusahaan/ *Good Coporate Governance* pada perusahaan keluarga CV Wahana Karya Jaya. Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengeksplore tentang konsep dari Good Coporae pada CV Wahana Karya Jaya sebagai perusahan keluarga diantaranya Transparency , Accountability, Independency, Fairness dan Dimana dalam penelitian ini berfokus pada sejauhmana implementasi GCG yang sudah diterapkan pada perusahaan dan bagaimana kondisi kinerja keuangan perusahaan dimana subjek penelitian merupakan perusahaan keluarga dimana dalam pengelolannya terdapat campur tangan dari pihak agen yang berasal dari keluarga pemilik . Adapun perusahaan yang dipilih merupakan CV bidang

percetakan, penerbit dan distributor buku yang berada di Jombang yang sudah berdiri sejak tahun 1997 hingga saat ini . Alur penelitian ini akan berfokus pada pengambilan data secara observasi, wawancara, dokumentasi serta penelusuran data online terkait objek penelitian prinsip-prinsip GCG sendiri.

Wawancara yang dilakukan dengan menentukan informan terkait, pemilihan informan ini menggunakan teknik purpose sampling artinya pemilihan informan memiliki kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Observasi dilakukan guna mengamati aktivitas dalam perusahaan untuk mengetahui kinerja perusahaan serta interaksi antar organ perusahaan. Dokumentasi digunakan untuk memvalidasi data yang ada. Dokumentasi bisa berupa pengambilan data yang diperoleh dari informan yang dapat mendukung analisa peneliti, bisa berupa laporan keuangan atau pun kata pendirian. Yang kemudian hasil dari Observasi, wawancara, dokumentasi tersebut diolah, dari hasil data yang sudah terkumpul dianalisa dan direduksi, reduksi data berdasarkan prinsip-prinsip GCG. Hasil dari data laporan keuangan perusahaan dilakukan perhitungan dan perbandingan dengan metode yang telah dijabarkan yaitu perhitungan terhadap rasio Profitabilitas ROA , kemudian dilakukan perbandingan pada periode sebelumnya yang dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan. Hasil dari perhitungan dan perbandingan dari laporan keuangan, dikorelasikan dengan hasil wawancara dan observasi terhadap penerapan prinsip GCG. Yang direduksi dan verifikasi sehingga menghasilkan kesimpulan dan informasi yang dapat diterima dan dipertanggung jawabkan.